

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP BPBD Sulawesi Barat Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukurankinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masamendatang.

Mamuju, Januari 2024

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Drs. M. Amir Maricar, MM

Pangkat: Pembina Utama Madya

NIP : 19640309 198903 1 009

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja BPBD Sulawesi Barat tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pada BPBD Sulawesi Barat yakni **"Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana"**:

- Diukur dengan ***Indeks Ketahanan Daerah*** berdasarkan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Bidang Teknis yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja BPBD Sulawesi Barat juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan SDGs / TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Sulawesi Barat.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 90 % ; sampai dengan Akhir bulan Desember 2023 terealisasi **95,02 %**. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar **97,22 % dari target** terjadi Penurunan sebesar 2,20%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Barat ke depan, sebagai berikut:

- Kerentanan bencana di Sulawesi Barat meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perubahan pola pemanfaatan lahan dan perubahan iklim.
- Indeks Ketahanan Daerah masih rendah dalam rangka mendukung Penurunan Indeks Resiko Bencana.
- Kapasitas dalam menghadapi bencana di Sulawesi Barat belum merata dan masih memerlukan penguatan pada semua aspek kapasitas.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai pijakan bagi BPBD Sulawesi Barat untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Daftar Isi

KATAPENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2.Landasan Hukum.....	7
1.3.Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	9
1.4.Isu-isu Strategis.....	11
1.5.Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1.Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	17
2.2.Strategi dan Arah Kebijakan.....	18
2.3.Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	19
2.4.Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1.Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	21
3.2.Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya.....	27
BABIV PENUTUP.....	30
4.1. Permasalahan.....	30
4.2. Rekomendasi Penyelesaian Masalah.....	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	33
Gambar Dokumentasi Foto Kegiatan.....	34
Perjanjian Kinerja Tahun 2023	37

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung- jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

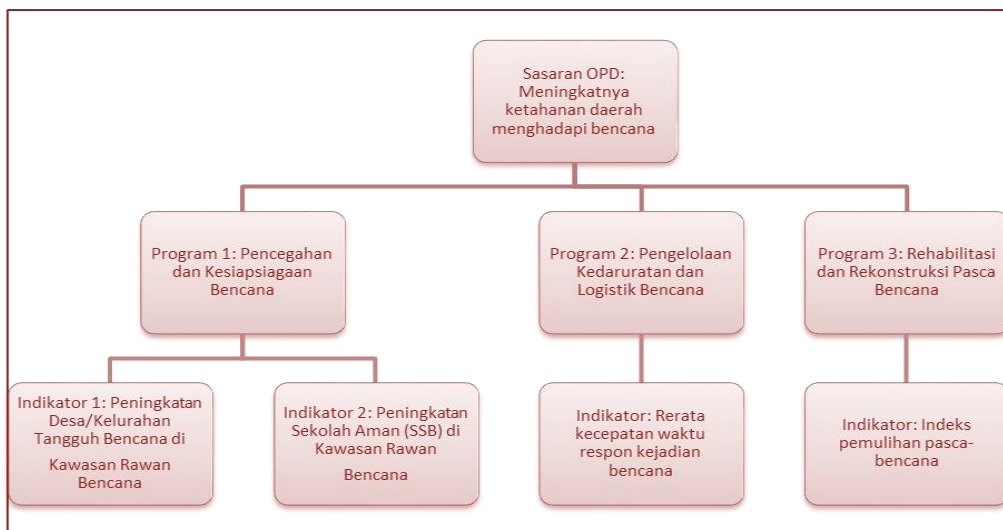
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat Pada Tahun 2023 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan pada Program – program BPBD Provinsi Sulawesi Barat , serta mengacu kepada visi dan misi BPBD sebagaimana tertuang dalam Renstra BPBD Tahun 2023 – 2026, sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling bersinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi BPBD. Laporan Kinerja BPBD Tahun 2023 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan BPBD yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut lingkup penyusunan LKjIP adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil BPBD Tahun 2023. Perencanaan strategis , target dan capaian kinerja , dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan / atau Penetapan Kinerja (PK) BPBD Tahun 2023.

1.2.Landasan Hukum

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Sulawesi Barat, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Sulawesi Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Barat tahun 2023 – 2026.

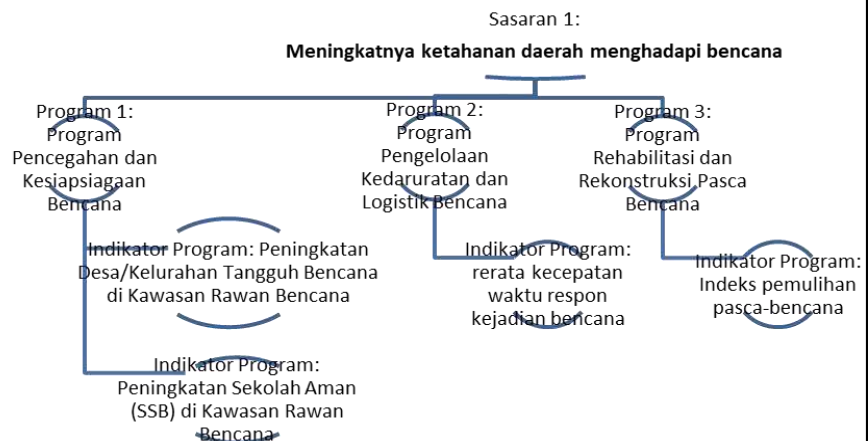
Mandat Kinerja BPBDSULBAR

Mandat kinerja BPBD SULAWESI BARAT sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



Gambar I.2 Mandat Kinerja BPBD SULBAR

Menjalankan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana



PETA PROSES BISNIS

Proses Bisnis Utama

1. Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana
2. Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana
3. Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana
4. Indeks pemulihan pasca-bencana

Proses Bisnis Pendukung Lainnya

5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Proses Bisnis Manajemen

6. Perencanaan, monev, pelaporan dan pengelolaan
7. Pengelolaan keuangan dan aset
8. Pengelolaan kepegawaian, naskah dinas, dan kerumahtanggaan

1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, BPBD Sulbar memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut :

Gambar I.3. Tugas dan Fungsi Organisasi BPBD SULBAR

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulbar Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Sulbar mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana. Adapun fungsi BPBD Sulbar sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. perumusan, penetapan pedoman dan pengarahannya penyelenggaraan kebijakan teknis urusan penanggulangan bencana di daerah;
3. penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
4. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
5. penyusunan, penetapan, penginformasian peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
6. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
7. pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
8. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
9. pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana;
10. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana;
11. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana kabupaten/kota;
12. pelaksanaan dekonsentrasi tugas pembantuan;
13. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
14. pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Perda Sulbar No. 1 Tahun 2018 dan Pergub Sulbar No. 80 Tahun 2018

Gambar I.4. Peta Jabatan pada Organisasi BPBD SULBAR

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi, sumberdaya manusia BPBD SULBAR dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur Sulbar Nomor 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
1. KepalaPelaksana 2. Sekretariat: 1) Sub Bag. Program 2) Sub Bag. Keuangan dan Aset 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan: 1) Sub Bid Pencegahan 2) Sub Bid Pencegahan dan Kesiapsiagaan 4. Kabid Penanganan Darurat dan logistik: 1) Sub. Bidang Kedaruratan 2) Sub Bidang Logistik 5. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi: 1) Sub Bid. Rehabilitasi 2) Sub Bid. Rekonstruksi	1. Subbag Program : 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (Perencana Ahli Muda) 2) Pengelola Sistem dan Data 2. Subbag Keuangan (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah) 1) Bendahara 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Pengelola Gaji 4) Pengelola Akuntansi 5) Verifikator Data Laporan Keuangan 3. Subbag Umum dan Kepegawaian : 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengadministrasi Persuratan 3) Pranata Kearsipan (Arsiparis) 4) Pengadministrasi Kepegawaian 5) Teknisi Sarana dan Prasarana 6) Pengelola Barang Milik Negara 7) Pengemudi 4. Subbid Pencegahan: 1) Pengadministrasi Umum 2) Analisis Mitigasi Bencana 5. Subbid Kesiapsiagaan: 1) Penata Kebencanaan 6. Subbid Kedaruratan: 1) Pengadministrasi Umum 2) Penata Kebencanaan 7. Subbid Logistik 1) Pengadministrasi Umum 2) Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik 3) Pengelola Sarana Operasi 8. Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik 1) Pengadministrasi Umum 2) Penyusun Rencana Rehabilitasi 9. Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi 1) Penyusun Rencana Rehabilitasi

Sumber: Peraturan Gubernur Sulbar Nomor 104 tahun 2018

1.4. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi BPBD Sulawesi Barat sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "Menurunkan risiko bencana", antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a. Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
- b. Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
- d. Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
- e. Pengembangan PRBBK (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas) dengan mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;
- f. Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui klaster-klaster penanggulangan bencana, perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap

- sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia ;
- g. Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana ;
 - h. Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi ;
 - i. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

2. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- a. Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
- b. Belum optimalnya mekanisme penanganan kedaruratan ;
- c. Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah ;
- d. Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola belanja tak terduga dan dana siap pakai (*on call*) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak-pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan ;
- e. Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang penanganan darurat baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB ;
- f. Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas ;
- g. Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan ;
- h. Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan;

- i. Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana ;
- j. Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang logistik dan peralatan baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a. Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- b. Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi maupun kerusakan fisik dan sosial ekonomi akibat bencana.
- d. Membangun koordinasi dan mekanisme pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di luar Sulawesi Barat yang berdampak pada kehidupan mahasiswa yang tinggal / warga pendatang sementara di Sulawesi Barat.

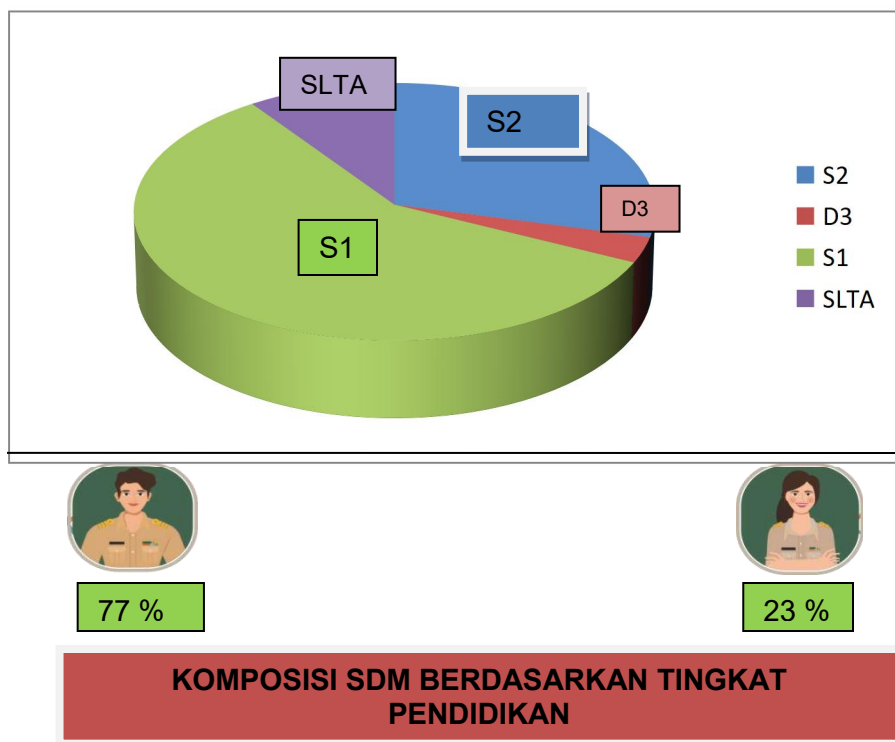
1.5. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Perempuan
A.	Jabatan Struktural/Fungsional						
1.	Kepala Pelaksana	1	S1	1	S2	1	
2.	Sekretaris	1	S1	1	S1	1	
3.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	S1	1	S2	1	
5.	Kabid Kedaruratan dan Logistik	1	S1	1	S2	1	
6.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	S1	1	S1	1	
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	S1	1	S1	1	
B.	Jabatan Pelaksana Substantif						
18.	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	2	S1/S2	2	S1	1	
19.	Penata Penanggulangan Bencana	5	S1	5	S1/S2	5	
20.	Perencana Ahli Muda	1	S1/S2	1	S2	1	
21.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	1	S1	1	S1		1
22.	Penelaah Teknis Kebijakan	12	S1	12	S2/S1	10	2
23.	Arsiparis	1	S1	1	S2	1	
C.	Jabatan Pelaksana Pendukung/Administratif						
24.	Bendahara / Penelaah	1	S1	1	S1	1	
25.	Pengadministrasian Perkantoran	5	D3	5	S1	1	4
	Jumlah	31		31		24	7

Sumber: Data Kepegawaian BPBD Sulawesi Barat per Desember 2023



Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM BPBD Sulawesi Barat perbandingan antara laki-laki (77 %) dan perempuan (23 %) untuk jenjang pendidikan S2 sebanyak 9 orang (29 %) , disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 18 orang (58 %), D3 1 orang (3 %) dan SLTA 3 orang (8 %). Komposisi pegawai laki-laki sebanyak 27 orang (77 %) lebih banyak dibanding pegawai perempuan 8 orang (23 %), dan yang menduduki jabatan struktural lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai pada bidang teknis sebanyak 10 orang, terutama 10 orang Tenaga di bidang Kedaruratan dan Logistik yang terbentuk dalam suatu TIM Reaksi Cepat untuk dapat merespon Setiap kejadian bencana yang sewaktu – waktu sering terjadi yang akan berpengaruh pada optimalisasi fungsi BPBD Sulawesi Barat sebagai penyelenggara penanggulangan bencana terutama pada tahap kedaruratan dan pascabencana.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap Tanah	
2	Peralatan dan Mesin	25.537.500.093
3	Gedung dan Bangunan	3.732.727.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.442.287.750
1	Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.000
	Akumulasi Penyusutan	(22.918.932,969)

**Nilai aset berdasarkan draft laporan aset tahun 2022*

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa + Modal	Jumlah
2022	Rp. 3.525.435.775,00	Rp. 3.737.719.940,00	Rp. 7.263.155.715,00
2023	Rp. 3.092.403.077,00	Rp. 6.146.768.727,00	Rp. 9.239.171.804,00

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Sulawesi Barat berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Barat . Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2022 dibanding tahun 2023 terdapat kenaikan anggaran belanja sebesar Rp. 1.976.016,089 atau sebesar 21,38 %. Hal ini menunjukkan bahwa Peningkatan Anggaran mutlak dibutuhkan agar Penurunan Resiko Bencana dapat diturunkan , melalui peningkatan kapasitas (IKD) kegiatan – kegiatan prioritas

unggulan BPBD Sulawesi Barat dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi kejadian bencana yang rentan terjadi di Provinsi Sulawesi Barat.

BAB 2

Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Untuk Tahun 2023, mengacu pada program OPD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD Perubahan 2023 – 2026 Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulbar yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2023 – 2026, telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai cascade Kinerja, BPBD Sulawesi Barat mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah BPBD Sulawesi Barat selama lima tahun adalah: **"Menurunkan Indeks risiko bencana"**

Adapun sasaran BPBD Sulawesi Barat dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulbar, Tahun 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2023	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8			11
1.	Menurunnya Indeks Resiko Bencana Provinsi Sulawesi Barat	Point Indeks Resiko Bencana yang Diturunkan	Angka Indeks	153,1	153,1	149,9	144,7			144,7

2.2.Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Barat	1. Peningkatan Kapasitas terhadap Penanggulangan bencana	1) Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi Terhadap Bencana 2) Peningkatan Kesiapsiagaan Terhadap Potensi Bencana 3) Peningkatan Upaya Tanggap Darurat Bencana 4) Penguatan Sistem Pemulihan Pasca Bencana 5) Pengembangan Pusat Sistem Mitigasi Bencana

2.3.Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran BPBD Sulawesi Barat tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Aktivitas	Jumlah Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam menghadapi bencana	1. Program Penanggulangan Bencana	4.283.569.506
	1.1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	109.322.478
	1.2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	3.121.576.151
	1.3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	556.519.174
	1.4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	496.151.703
	1.1.1. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Edukasi Rawan Bencana Provinsi	109.322.478
	1.1.2. Sub Kegiatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	3.116.576.151
	1.1.3. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	292.329.078
	1.1.4. Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Provinsi	203.822.625
	1.1.5. Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Wabah Penyakit	556.519.174
Total		4.283.569.506

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.951.962.298
	1.1. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	123.271.215
	1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.157.173.077
	1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	17.040.000
	1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	208.055.000
	1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.003.549
	1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.807.900

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.237.620
1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	663.373.937

2.4.Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya . Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat yang mempresentasikan kinerja instansi dengan Gubernur Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BADAN PENANGGULANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menurunnya Indeks Resiko Bencana Sulawesi Barat	Indeks resiko Bencana (Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan bencana	153,85 (1,227)
		Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai dengan dinyatakan Sah/ Legal	100 %
		Tingkat Ketersediaan Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (RPB) Tingkat Provinsi	80 %
		Persentase Penanganan Pra Bencana	80 %
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat bencana	100 %
		Persentase Penanganan Pasca bencana	80 %
		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang sesuai	85 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja Pemerintah Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Lingkup OPD	B
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup SKPD	85 %

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

*Capaian
Kinerja Tahun
2023*

3.1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Bencana Daerah Sulbar telah melaksanakan

pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulbar dengan Bapak Gubernur Sulbar tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Pada Tahun Anggaran 2023, BPBD Provinsi Sulawesi Barat memiliki total alokasi anggaran Pokok sebesar Rp.8.216.184.429,- dan setelah Perubahan adalah sebesar Rp.9.239.171.804,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.3.092.403.077,- , Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.962.578.877 serta belanja Modal sebesar 1.184.189.850,- untuk melaksanakan 2 (Dua) program ,12 Kegiatan dan 39 Sub kegiatan.

a) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, alokasi anggaran sebesar Rp. Rp.4.951.962.298,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.794.339.343,- atau sebesar 96.82%, dengan rincian realisasi per Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 65.097.500,- atau sebesar 99,63 % dengan Keluaran (output) 4 Dokumen dan
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 17.700.000,- atau sebesar 99,83 % dengan Keluaran (output) 1 Dokumen
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 650.000,- atau sebesar 100 % dengan Keluaran (output) 1 Dokumen
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 650.000,- atau sebesar 100 % dengan Keluaran (output) 1 Dokumen
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 34.000.000,- atau sebesar 99,53 % dengan Keluaran (output) 1 Dokumen
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 4.079.800,- atau sebesar 99,66 % dengan Keluaran (output) 4 Laporan
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 3.061.273,196- atau sebesar 98,99 % dengan Keluaran (output) 40 ASN selama Setahun.
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 17.580.000,- atau sebesar 100 % dengan Keluaran (output) 1 Laporan.

9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan / Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD ;
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 47.190.000,- atau sebesar 100 % dengan Keluaran (output) 3 Laporan.
10. Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ;
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 17.040.000,- atau sebesar 100 % dengan Keluaran (output) 1 Paket.
11. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 110.455.000,- atau sebesar 100 % dengan Keluaran (output) 1 Paket.
12. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 86.600.000,- atau sebesar 95,58 % dengan Keluaran (output) 1 Paket.
13. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
Tidak terealisasi pengurangan Biaya dari 32.000.000 menjadi 7.000.000 , disebabkan rasionalisasi anggaran.
14. Penyiapan Bahan Logistik Kantor ;
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 28.957.000,- atau sebesar 99,97 % dengan Keluaran (output) 2 Jenis.
15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 13.198.400,- atau sebesar 98,03 % dengan Keluaran (output) 2 Jenis.
16. Penyediaan Bahan Material ;
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 45.918.700,- atau sebesar 99,67 % dengan Keluaran (output) 15 Jenis.
17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ;
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2022 adalah sebesar 188.375.177,- atau sebesar 91,51 % dengan Keluaran (output) 12 Laporan.
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ;
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 99.684.900,- atau sebesar 99,88 % dengan Keluaran (output) 3 Laporan.
19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 57.438.000,- atau sebesar 61,13 % dengan Keluaran (output) 12 Laporan .
20. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik ;
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 75.690.954,- atau sebesar 93,22 % dengan Keluaran (output) 3 Rekening.
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ;
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 212.500.000,- atau sebesar 99,73 % dengan Keluaran (output) 3 Jenis.

22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 56.376.352,- atau sebesar 100 % dengan Keluaran (output) 1 Unit.
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan ;
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2022 adalah sebesar 352.381.036,- atau sebesar 87,77 % dengan Keluaran (output) 28 Unit ;
24. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 18,644.000,- atau sebesar 92,94 % dengan Keluaran (output) 4 Jenis.
- a. **Program Penanggulangan Bencana**, alokasi anggaran sebesar Rp.4.287.209.506,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.984.998.764,- atau sebesar 92.95 %, dengan rincian realisasi per Sub kegiatan sebagaiberikut ;
 1. Sosialisasi , Komunikasi, Informasi , Edukasi , Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 109.322.478,- atau sebesar 100,00 % dengan Keluaran (output) 100 orang.
 2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana sampai dengan Akhir Desember 2023 berupa Aktivitas :
 - 2.1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana realisasi keuangan sebesar Rp. 1.920.212.599 atau sebesar 92,02 % dengan Output 950 Orang
 - 2.2. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Pencegahan dan Mitigasi Bencana realisasi keuangan sebesar Rp. 301.024.000,- atau sebesar 98,56 % dengan Output 1 Dokumen.
 - 2.3. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana realisasi keuangan sebesar Rp. 226.897.730 atau sebesar 100 %. Dengan Output 250 Orang.
 - 2.4. Penyusunan Rencana Kontijensi realisasi keuangan sebesar Rp. 197.654.900 atau sebesar 98,18 %. Dengan Output 1 Dokumen.
 - 2.5. Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) realisasi keuangan sebesar Rp. 102.664.420 atau sebesar 91,45 %. Dengan Output 35 Orang.
 - 2.6. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana realisasi keuangan sebesar Rp. 167.398.640 atau sebesar 89,25 %. Dengan Output 1 Laporan.

3. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit Realisasi sampai dengan Desember 2023 dengan Aktivitas :

3.1. Respon Cepat Terhadap Bencana realisasi keuangan sebesar Rp. 175.890.000 atau sebesar 98,70 %. Dengan Output 2 Laporan.

3.2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluakuasi Korban Bencana realisasi keuangan sebesar Rp. 311.345.600 atau sebesar 95,00 %. Dengan Output 250 Orang.

4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi

Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 259.460.904,- atau sebesar 88,76 % dengan Keluaran (output) 6 Laporan.

5. Penanganan Pasca Bencana Provinsi

Realisasi Keuangan s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar 200.714.494,- atau sebesar 98,48 % dengan Keluaran (output) 1 Dokumen.

Tersisa Anggaran sampai dengan Akhir Triwulan IV (31 Desember 2023) adalah 459.833.697 disebabkan karena :

1. Sisa anggaran Koordinasi Luar daerah dan Dalam daerah yang tidak digunakan berdasarkan aktivitas yang telah dilaksanakan selama periode Januari s/d Desember 2023 sudah memenuhi rasio kecukupan anggaran tersebut.
2. Sisa Anggaran Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana berupa Pelatihan Kelembagaan tidak terlaksana diakibatkan sisa waktu yang tidak mencukupi karena kegiatan lain yang bersamaan waktunya sampai dengan akhir Desember 2023.
3. Sisa Anggaran kegiatan lainnya berdasarkan realisasi anggaran telah mencukupi penggunaannya seperti pembayaran rekening Listrik , Air dan Internet dilakukan penghematan, Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan sesuai jumlah pegawai sampai dengan akhir Desember 2023 tidak sepenuhnya, diakibatkan ada yang pensiun dan pindah instansi.

REALISASI KEGIATAN BIDANG TEKNIS

No	Uraian/Kegiatan/Keluaran	Vol. Target	Vol. Realisasi
Program Penanggulangan Bencana			
1	Sosialisasi , Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	100 Orang	100 Orang
2	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	950 Orang	850 Pasien
4	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	250 Orang	250 Orang
5	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Tim TRC	35 Orang	35 Orang
6	Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi	1 Dokumen	1 Dokumen
7	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Laporan	1 Laporan
8	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	6 Laporan	2 Laporan
9	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	750 Orang	300 Orang
10	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	6 Laporan	6 Laporan
11	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen

Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1	2	3	4		
1	Menurunnya Indeks Resiko Bencana Sulawesi Barat	Point Indeks Resiko Bencana	153,85	160,08	45 %
		Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai dengan dinyatakan Sah/ Legal	100 %	80 %	90 %
		Tingkat Ketersediaan Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (RPB) Tingkat Provinsi	80 %	80 %	90 %
		Persentase Penanganan Pra Bencana	80 %	80 %	90 %
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	80 %	100 %
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	80 %	80 %	100 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	85 %	85 %	85 %
		Nilai SAKIP Lingkup BPBD	B		
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup BPBD	85 %	95,49 %	95,49 %

3.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya.

Perbandingan pencapaian Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan BPBD dalam hal Akuntabilitas Kinerja , Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Adalah Sebagai Berikut :

No.	Indikator Kinerja	2022	2023
1	Point Indeks Resiko Bencana	165,23	160,08
2	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai dinyatakan Sah dan Legal	30 %	90 %
3	Tingkat Ketersediaan Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (RPB) Tingkat Provinsi	15 %	42 %
4	Persentase Penanganan Pra Bencana	100 %	95 %
5	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	95 %
6	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 %	100 %
7	Tingkat Capaian Kinerja Lingkup BPBD	97,22 %	95,02 %

Dari perbandingan Program 2022 dan 2023 ada beberapa hal yang dapat dipaparkan yaitu :

1. Capaian untuk penurunan IRBI target semula 153,85 tetapi hanya tercapai 160,08 , disebabkan masih banyaknya dokumen – dokumen pengurangan resiko bencana dari beberapa BPBD Kabupaten yang belum diperpanjang masa berlakunya seperti Dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana) , RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) dan Rencana Kontijensi per jenis bencana sehingga Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2023 mengalami penurunan yang dapat berpengaruh pada penurunan IRBI Sulawesi Barat.
2. Capaian realisasi keuangan menurun antara Tahun 2022 dan 2023 hal ini disebabkan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran baru bisa dilaksanakan di Bulan Nopember 2023 di akibatkan pengesahan Perubahan Anggaran di Akhir bulan Oktober 2023, sehingga tidak maksimal dilaksanakan seluruh kegiatan mengingat waktu yang terbatas hanya sekitar 1 setengah bulan.
3. Pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah dan legal mengalami kemajuan dalam penyelesaiannya walaupun hasil penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana belum disahkan.
4. Tingkat penyediaan Dokumen Strategi Pengurangan Resiko bencana secara persentase mengalami kemajuan dari Tahun 2022 yang hanya memiliki

Dokumen Kajian Resiko Bencana, dan di tahun 2023 telah menyelesaikan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi Gempa Bumi.

5. Untuk Presentase Penanganan Pra Bencana di tahun 2023 cukup baik walaupun terjadi penurunan persentase dibandingkan Tahun 2022, yang tidak dilaksanakan hanya penguatan kelembagaan pada Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dikarenakan waktu yang tidak cukup.
6. Untuk Presentase Penanganan Darurat Bencana di Tahun 2023 telah dilaksanakan secara keseluruhan walaupun hanya dua kejadian bencana yang ditangani yaitu Banjir dan Bencana Kekeringan sehingga rencana yang telah ditetapkan untuk 6 Laporan di seluruh Kabupaten hanya 2 Laporan saja , sementara untuk sisa logistic bantuan menjadi stok digudang yang akan dipergunakan untuk membantu Kabupaten lain jika terjadi bencana.

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

- 4.1. Permasalahan
- 4.2. Rekomendasi
Penyelesaian
Masalah

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada sasaran strategis BPBD Sulbar pada tahun 2023 telah berhasil melampaui target yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Hal tersebut menunjukkan bahwa efisiensi kinerja anggaran maupun efektivitas kinerja fisik dari BPBD Sulbar mampu mendorong pencapaian target yang sudah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Meskipun demikian, masih ada beberapa permasalahan yang patut menjadi perhatian dan menuntut solusi yang tepat.

4.1. Permasalahan

1) Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana

Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah di Kabupaten/Kota dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat serta dalam rangka mendukung Penurunan Indeks Resiko Bencana Sulawesi Barat secara Nasional.

2) Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana

Pemuktahiran Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi telah dilaksanakan namun belum di sahkan untuk menjadi dokumen yang legal dan baru dapat disahkan di Tahun 2024.

3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana

- Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok siaga bencana (KSB) di daerah masing-masing.
- Belum adanya pembentukan Kluster Darurat Bencana yang dapat berfungsi lintas sector , dengan penguatan Pergub maupun Perbup sehingga jika terjadi bencana semua Instansi baik pemerintah maupun swasta dapat bahu membahu dalam penanggulangan bencana

-

4) Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan

- Kurangnya pengetahuan petugas dalam penanggulangan bencana baik kabupaten/kota, OPD, Instansi serta lembaga terkait kebencanaan.
- Keterbatasan peralatan kebencanaan yang dimiliki oleh Kabupaten dan provinsi.

3) Pengembangan dan Peningkatan Pusdalops Penanganan Bencana

- Terlambatnya informasi kejadian bencana yang dilaporkan oleh BPBD Kabupaten/Kota ke Pusdalops Penanggulangan Bencana.
- Masih belum tertibnya administrasi dan pelaporan kejadian bencana yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota setiap bulannya.
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang ada di Pusdalops PB masih belum bisa dilakukan secara maksimal.
- Belum seluruh Kabupaten/Kota yang sudah membentuk Pusdalops PB sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pendataan.

4) Peningkatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana

- Banyaknya proposal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kabupaten/Kota yang dikembalikan karena persyaratan yang tidak lengkap. Hal ini disebabkan minimnya SDM yang dapat menyusun proposal karena sering terjadi mutasi di Lingkungan Kabupaten/Kota.

5) Perluasan Gudang Logistik

Perluasan gudang logistic adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar – tawar lagi, banyaknya stok barang , peralatan dan sarana dan prasarana penunjang kebencanaan sering rusak karena penempatannya tidak sesuai yang diharapkan , kecilnya gudang logistic serta alat penunjangnya belum dapat memenuhi kondisi gudang logistic yang ada sekarang.

4.2. Rekomendasi Penyelesaian Masalah

1. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana.

- Perlu ditingkatkan komitmen BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana, serta ketersediaan data kebencanaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai tupoksi dan kewenangan dinas/instansi dan daerah masing-masing.
- Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana

- Memaksimalkan potensi yang ada dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Aksi PRB.

2. Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana

- Untuk Pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Dokumen Rencana Kontijensi Perjenis bencana akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Resiko Bencana

- Akan mendorong dan mengusulkan kepada Gubernur untuk dapat membentuk Kluster Darurat Bencana yang melibatkan Pemerintah dan Swasta agar terjalin sinergi dan kerjasama yang baik dalam rangka penanggulangan bencana
- Mendorong dan memberikan masukan kepada Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat agar juga membentuk Kluster Darurat Bencana di daerah masing-masing

4. Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan

- Perlunya ditingkatkan komitmen antara BPBD provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota agar selalu melaksanakan Simulasi Bencana agar kesiapsiagaan tetap terjaga.
- Perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas lanjutan bagi aparatur baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota dalam hal mitigasi bencana sehingga tidak ketinggalan pengetahuan perihal kebencanaan dan hal-hal yang sifatnya baru dan mutakhir sesuai dengan perkembangan jaman.

5. Peningkatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana

- Memfasilitasi Kabupaten/Kota dan memberikan dukungan usulan bantuan pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana
- Melakukan pertemuan rutin, berkala dan khusus yang melibatkan seluruh BPBD Dan SKPD teknis kab/kota dalam rangka menghindari pendanaan dan usulan rehabilitasi ganda.
- Meningkatkan anggaran dan kegiatan pendukung sumber daya manusia aparatur pelaksana rehabilitasi daerah pasca bencana terkait

penghitungan kerugian dan kerusakan (DaLA) kabupaten/kota melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan hitung cepat /JITU PASNA, sosialisasi, serta konsultasi rutin dan berkala keBNPB.

- Melakukan Koordinasi dan pertemuan khusus dengan BPBD dan SKPD teknis terkait dalam menetapkan usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi guna menghindari tumpang tindih usulan dan pendanaan serta guna ditetapkannya kewenangan pelaksana infrastruktur dan sarana prasarana umum serta social oleh pemerintahdaerah.
- BPBD Kabupaten/Kota yang masih mempunyai kewajiban terkait laporan akhir kegiatan rehabilitasi daerah pasca bencana yang sumber dananya berasal dari BPPB, Agar segera melakukan pendekatan dan penjelasan kepada Kepala Daerah masing - masing serta berkonsultasi denganBNPB;

6. Perluasan Gudang Logistik

Telah melakukan upaya peningkatan kapasitas gudang logistic dengan mendorong usulan pendanaan melalui tim TAPD dan DPRD Sulbar , hal ini dimaksudkan agar semua barang dan peralatan dapat ditampung kedalam gudang yang cukup , guna menghindari kerusakan – kerusakan yang ditimbulkan.

Dokumentasi Kegiatan BPBD Tahun 2023



PNS dan PTT Lingkup BPBD Provinsi Sulawesi Barat



Foto Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana



**Dokumentasi Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan
Di Kabupaten Mamasa**



BPBD Sulbar Beri Pelatihan Mitigasi Bencana untuk PKK

Foto Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Mitigasi Bencana



Foto Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi



Foto Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pasca Bencana



Kegiatan Respon Cepat Terhadap Bencana Alam



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. AMIR MARICAR, MM
Jabatan : Kepala Pelaksana DPBD Prov. Sulbar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKMAL MALIK
Jabatan : PJ. GUBERNUR SULAWESI BARAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuja, 8 Februari 2023

Pihak Kedua,

Pj. Gubernur Sulawesi Barat

AKMAL MALIK

Pihak Pertama,

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. AMIR MARICAR, MM
No. 13640.399.138903.1.009

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Sulawesi Barat	Persentase penurunan Skor Risiko Bencana (Meningkatnya Kapasitas dalam pengelolaan bencana)	153,85 (1,227)
		Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai dengan dinyatakan Sah/ Legal	100 %
		Tingkat Ketersediaan Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (RPB) Tingkat Provinsi	80 %
		Persentase Penanganan Pra Bencana	80 %
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	80 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang sesuai	85 %
		Nilai SAKIP Lingkup OPD	8
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup SKPD	85 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.101.612.140	APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 6.114.572.289	APBD
TOTAL APBD		Rp. 8.216.184.429	

Mamuju, 16 Januari 2022

Pihak Kedua,
Pj. Gubernur Sulawesi Barat

AKMAL MALIK

Pihak Pertama,
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. AMIR MARICAR, MM
Np. 10640109 198903 1 000

